



REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia (selanjutnya disebut sebagai "Pihak"),

Mengingat hubungan persahabatan dan kerja sama yang ada antara dua Negara, Pemerintah, dan Masyarakat;

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin antara kedua negara melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan;

Dengan mempertimbangkan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan keamanan dunia;

Bertindak dalam semangat kemitraan dan kerja sama dengan ingin mengembangkan hubungan baik di bidang pertahanan, dalam rangka untuk saling menghargai, meningkatkan kepercayaan diri, dan saling pengertian,

Menyadari bahwa memperkuat kerja sama di bidang pertahanan akan menguntungkan bagi pertahanan nasional kedua negara, khususnya Angkatan Bersenjata;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL I DEFINISI

Istilah yang digunakan dalam Memorandum of Understanding (MoU) didefinisikan sebagai berikut:

1. "Pihak Pengirim" berarti negara yang mengirim personel, aset dan peralatan ke wilayah Pihak Penerima;
2. "Pihak Penerima" berarti negara di wilayah yang personel, aset dan peralatan dari Pihak pengirim berada;
3. "Personel" berarti personel militer dan sipil yang bekerja dalam lembaga-lembaga dan badan-badan para Pihak.

PASAL II TUJUAN

1. Tujuan MoU ini adalah untuk membangun prinsip-prinsip umum dan prosedur-prosedur kerja sama antara Para Pihak dalam bidang pertahanan.
2. Para Pihak wajib bekerja sama atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan, timbal balik dan kepentingan bersama, dan menghormati penuh kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing negara.

PASAL III KOMPATIBILITAS DENGAN PERSETUJUAN-PERSETUJUAN LAINNYA

MoU ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari perjanjian - perjanjian internasional yang secara individual atau bersama-sama telah dibuat dengan negara-negara lain atau organisasi internasional.

PASAL IV OTORITAS YANG BERKOMPETEN

1. Otoritas yang Berkompeten bertanggung jawab atas implementasi MoU ini adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Serbia.
2. Untuk tujuan pelaksanaan MoU ini, Otoritas yang Berkompeten dari Para Pihak dapat membuat pengaturan-pengaturan tambahan.

PASAL V AREA KERJA SAMA

Para Pihak dapat bekerja sama dalam bidang-bidang berikut:

1. Kebijakan Pertahanan dan Strategis;
2. Dukungan Logistik dan Kerja Sama Industri Pertahanan;
3. Pendidikan dan Pelatihan, dan
4. Kerjasama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh Para Pihak atau Otoritas yang Berkompeten.

PASAL VI BENTUK KERJA SAMA

Kerja Sama antara Para Pihak dapat dilakukan melalui:

1. Kunjungan Pejabat;
2. Dialog Pertahanan dan Strategis,
3. Pertukaran Intelijen,
4. Pertukaran Pengalaman dan Konsultasi;
5. Program Pelatihan dan Pendidikan;
6. Partisipasi dalam Konferensi, Simposium dan Seminar;
7. Pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industri pertahanan, dan
8. Bentuk-bentuk lain dari kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak atau Otoritas yang Berkompeten.

PASAL VII KOMITE BERSAMA

1. Sebuah Komite bersama dibentuk untuk secara efektif mencapai tujuan MoU ini.
2. Rapat akan diketuai oleh pejabat-pejabat senior pertahanan yang berwenang dari kedua Pihak.
3. Komite Bersama wajib:
 - a. Mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama yang menjadi kepentingan bersama;
 - b. Merekomendasikan kegiatan dan program kerja sama dalam kerangka MoU ini;

- c. Mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program-program kerja sama;
 - d. Mereview dan mengevaluasi pelaksanaan MoU ini;
 - e. Menyampaikan laporan kepada Menteri Pertahanan masing-masing dari kedua Pihak;
 - f. Menyelesaikan permasalahan atau perbedaan pandangan dari implementasi MoU ini.
4. Komposisi anggota Komite Bersama harus disepakati bersama oleh kedua Pihak.
 5. Komite Bersama akan bertemu sekali dalam dua tahun atau apabila diperlukan pada tempat dan tanggal sebagaimana yang disepakati bersama.
 6. Komite Bersama dapat membentuk sub-komite dan ketika dianggap perlu untuk melaksanakan kegiatan kerja sama, program, atau tugas-tugas khusus lainnya. Sub-komite harus melaporkan kepada Komite Bersama.

PASAL VIII PERTUKARAN INFORMASI

1. Selama pelaksanaan MoU ini, Para Pihak akan melakukan pertukaran informasi yang bersifat tidak rahasia.
2. Pertukaran dan perlindungan informasi rahasia dibuat dengan pengaturan terpisah.

PASAL IX BIAYA-BIAYA

1. Pihak tuan rumah dari pertemuan Komite Bersama akan menanggung biaya pertemuan dan penyambutan, yang dikeluarkan dalam mengadakan pertemuan tersebut. Setiap Delegasi Para Pihak harus menanggung biaya perjalanan sendiri untuk menghadiri pertemuan.
2. Biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan MoU ini dibuat dengan pengaturan keuangan yang terpisah oleh kedua Pihak.

**PASAL X
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Selama pelaksanaan MoU ini, Para Pihak dapat membuat perjanjian terpisah tentang perlindungan hak-hak atas kekayaan intelektual.

**PASAL XI
KETENTUAN UMUM**

1. Para Personil dari Pihak Pengirim wajib untuk mematuhi hukum-hukum, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Pihak Penerima pada kegiatan yang dilakukan dalam rangka MoU ini di wilayah Pihak Penerima.
2. Kewenangan disiplin untuk Personel Pihak Pengirim ada pada Komandan mereka, atau PNS senior atau perwakilan militer di wilayah Pihak Penerima.
3. Untuk setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Pihak Penerima, Personel Pihak Pengirim akan tunduk di bawah aturan hukum Pihak Penerima.
4. Masing-masing Pihak menghapuskan klaim untuk kompensasi dalam kasus kematian, cedera atau kerusakan yang mungkin terjadi pada Personel atau properti Pihak yang timbul dari tindakan atau kelalaian yang disebabkan oleh Personel Pihak lain dalam pelaksanaan MoU ini.
5. Sebagai pengecualian ayat (4) pada Pasal ini, kompensasi dapat diklaim dalam hal bahwa tindakan atau kelalaian telah terjadi karena kesalahan yang disengaja atau kelalaian. Dalam kasus seperti itu, klaim harus diselesaikan melalui negosiasi langsung antara Para Pihak tanpa dirujuk ke Pihak ketiga untuk penyelesaian.
6. Dalam kasus kematian, cedera atau kerusakan yang disebabkan kepada pihak ketiga oleh Personel Para Pihak dalam pelaksanaan MoU ini, Para Pihak harus menyepakati pembayaran ganti rugi. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, kasus harus dirujuk ke pengadilan yang kompeten dari negara di mana insiden yang mengakibatkan kerusakan terjadi.

PASAL XII PERAWATAN MEDIS

Dalam hal kebutuhan, Pihak Penerima dapat memberikan perawatan darurat medis dan gigi tanpa penggantian untuk Personel Pihak Pengirim pada saat berada di wilayahnya untuk tujuan pelaksanaan MoU ini.

PASAL XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan MoU ini, kedua Pihak akan mengadakan pembicaraan pada tingkat Komite Bersama untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
2. Dalam hal terjadi kegagalan penyelesaian pada tingkat ini, Kedua Ketua Bersama dari Komite Bersama akan merujuk hal tersebut kepada para Pihak, jika perlu melalui saluran resmi.

PASAL XIV AMANDEMEN

Para Pihak dapat membuat perubahan terhadap MoU ini setiap saat dengan persetujuan tertulis bersama. Amandemen disepakati akan berlaku menurut Pasal XVI dari MoU ini.

PASAL XV PENGHENTIAN

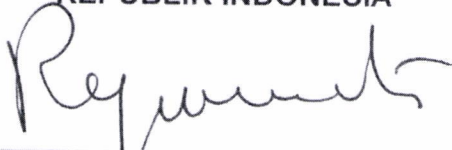
1. Salah satu Pihak dapat menarik diri dari MoU ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. MoU berakhir enam bulan setelah diterimanya pemberitahuan tertulis.
2. Dalam kasus MoU ini diakhiri, semua kegiatan dimulai pada periode saat MoU masih berlaku, harus dilakukan dalam kondisi yang sama seperti yang diterapkan pada saat kegiatan dimulai.
3. Dalam kasus pemutusan MoU ini, pengaturan dari Pasal IV, ayat 2, MoU ini akan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh pengaturan tersebut.

**PASAL XVI
PEMBERLAKUAN DAN DURASI**

1. MoU ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan kedua oleh Pihak yang menginformasikan satu sama lain dari pemenuhan prosedur internal mereka diperlukan untuk MoU mulai berlaku, sesuai dengan undang-undang nasional mereka masing-masing.
2. MoU ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 5 (lima) tahun kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri MoU ini.

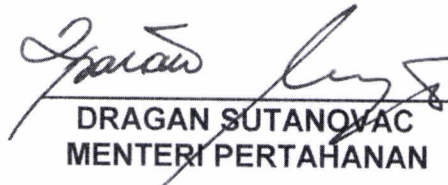
Dilakukan di **Jakarta** pada tanggal ... 13 September 2011 dalam dua rangkap asli dalam bahasa Indonesia, Serbia dan Inggris. Dalam hal adanya perbedaan dalam penafsiran MoU ini, versi bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



**PURNOMO YUSGIANTORO
MENTERI PERTAHANAN**

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SERBIA**



**DRAGAN SUTANOVAC
MENTERI PERTAHANAN**



REPUBLIK INDONESIA

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ
ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЈЕ
И
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ

Влада Републике Индонезије и Влада Републике Србије (у даљем тексту: „Стране”),

узимајући у обзир пријатељске и кооперативне односе који постоје између две државе, њихових влада и народа,

у жељи да сарадњом у области одбране, унапреде и ојачају билатералне односе између две државе,

полазећи од циљева и принципа Повеље Уједињених нација, у жељи да допринесу миру у свету,

понашајући се у духу партнерства и сарадње и са жељом да се развију добри односи у области одбране, ради побољшања узајамног поштовања, поверења и разумевања,

свесне чињенице да ће јачање сарадње у области одбране бити корисно за системе одбране обе државе, а посебно за њихове оружане снаге,

у складу са важећим законима и прописима две државе,

споразумеле су се о следећем:

Члан 1. Дефиниције

Термини који се користе у овом меморандуму о разумевању (у даљем тексту: „МоР”) имају следеће значење:

- (1) „Страна пошиљалац” означава државу која шаље особље, средства и опрему на територију државе Стране примаоца;
- (2) „Страна прималац” означава државу на чијој територији се налазе особље, средства и опрема Стране пошиљалоца;
- (3) „Особље” означава војна и цивилна лица на служби у институцијама и органима Страна.

Члан 2. Циљ

(1) Циљ овог МоР је успостављање општих принципа и процедура за сарадњу Страна у области одбране.

(2) Сарадња између Страна заснива се на принципима равноправности, реципроцитета и заједничких интереса, као и пуног поштовања суверенитета и територијалног интегритета обе државе.

Члан 3.
Однос МоР са другим уговорима

Овај МоР неће утицати на права и обавезе Страна које проистичу из међународних уговора које су појединачно или заједно закључиле са другим државама или међународним организацијама.

Члан 4.
Надлежни органи

(1) Надлежни органи за спровођење овог МоР су Министарство одбране Републике Индонезије и Министарство одбране Републике Србије.

(2) Ради реализације овог МоР, надлежни органи Страна могу да закључе посебне уговоре.

Члан 5.
Области сарадње

Стране могу сарађивати у следећим областима:

- 1) одбрамбене и стратегијске политике;
- 2) логистичке подршке и одбрамбене индустрије;
- 3) школовања и обуке, и
- 4) другим областима од заједничког интереса, о којима се Стране или њихови надлежни органи договоре.

Члан 6.
Облици сарадње

Сарадња између Страна може се остваривати путем:

- 1) званичних посета;
- 2) консултација у области одбране и стратегије;
- 3) размене обавештајних података;
- 4) размене искустава и консултација;
- 5) програма обуке и школовања;
- 6) учешћа на конференцијама, симпозијумима и семинарима;
- 7) куповине одбрамбених производа, трансфера технологије, техничке помоћи у оквиру сарадње у области одбрамбене индустрије, и
- 8) на друге начине о којима се Стране или њихови надлежни органи договоре.

Члан 7. Заједничка комисија

(1) Заједничка комисија ће бити формирана у циљу делотворног остваривања циљева овог МоР.

(2) Састанцима ће копредседавати високи званичници из области одбране Страна.

(3) Заједничка комисија ће:

- а) дефинисати заједничке циљеве и питања од обостраног интереса;
- б) препоручивати активности и програме сарадње у оквиру МоР;
- в) координирати, пратити и контролисати реализацију тих активности и програма сарадње;
- г) вршити преглед и давати оцену о спровођењу МоР;
- д) подносити извештаје министрима одбране обе Стране;
- ђ) решавати неспоразуме и неслагања у погледу спровођења МоР.

(4) Стране ће се заједнички договорити о члановима који чине састав Заједничке комисије.

(5) Заједничка комисија састајаће се једном у две године или у случају потребе, а место и датум одржавања састанка биће заједнички договорени.

(6) Када оцени да је то неопходно за спровођење активности, програма или других конкретних задатака у оквиру сарадње, Заједничка комисија може успоставити поткомисије. Поткомисије ће за свој рад одговарати Заједничкој комисији.

Члан 8. Размена података

(1) Током реализације МоР, Стране ће размењивати искључиво податке за јавну употребу.

(2) Размена и заштита тајних података биће регулисана посебним уговором.

Члан 9. Трошкови

(1) Страна која је домаћин састанка Заједничке комисије, сноси трошкове реализације састанка, као и трошкове угоститељских услуга (смештај и исхрана). Делегација сваке од Страна сносиће сопствене путне трошкове који настану у вези са њиховим присуствовањем тим састанцима.

(2) Остали трошкови до којих дође током реализације овог МоР биће предмет посебног финансијског аранжмана који ће Стране међусобно закључити.

Члан 10.
Заштита права интелектуалне својине

Ради реализације овог МоР, Стране могу закључити посебан уговор о заштити права интелектуалне својине.

Члан 11.
Опште одредбе

(1) Током активности које се, у складу са овим МоР, реализују на територији државе Стране примаоца, особље Стране пошиљаоца је обавезно да поштује законе, прописе и процедуре Стране примаоца.

(2) Особље Стране пошиљаоца дисциплински је одговорно свом команданту, односно вишем државном службенику или војном представнику на територији државе Стране примаоца.

(3) За свако почињено кривично дело на територији државе Стране примаоца, особље Стране пошиљаоца, биће под кривичном јурисдикцијом Стране примаоца.

(4) Свака од Страна одриче се потраживања накнаде штете у случају смрти, повреде или штете, које могу задесити особље или имовину те Стране, а које проистичу из чињена или нечињена проузрокованих од стране особља друге Стране у току реализације овог МоР.

(5) Изузетно од одредбе става (4) овог члана, захтеви за накнаду штете могу се потраживати у случају ако се то чињење или нечињење изврши намерно или услед грубе непажње. У том случају, захтеви за накнаду штете решаваће се директним преговорима између Страна, без предавања трећој страни на решавање.

(6) У случају смрти, повреде или штете које трећој страни нанесе особље Страна у току вршења активности у складу са овим МоР, Стране ће се договорити у вези са плаћањем накнаде. Уколико се договор не постигне, случај ће бити предат надлежним судовима државе у којој се догодио инцидент који је проузроковао штету.

Члан 12.
Медицинска заштита

Страна прималац пружиће, у случају потребе, без накнаде, хитну медицинску и стоматолошку заштиту особљу Стране пошиљаоца док борави на територији државе Стране примаоца у циљу реализације овог МоР.

Члан 13.
Решавање спорова

(1) У случају било каквог спора у вези са тумачењем и спровођењем овог МоР, представници Страна ће, у оквиру Заједничке комисије, преговарати у циљу решавања неспоразума на пријатељски начин.

(2) У случају да се спор не реши на овом нивоу, оба копредседавајућа Заједничке комисије ће предмет уступити Странама на решавање, званичним путем, уколико то буде потребно.

Члан 14.
Измене и допуне

Стране могу да измене и допуне МоР у било које време, заједничком писаном сагласношћу. Усаглашене измене и допуне ступиће на снагу, у складу са чланом 16. овог МоР.

Члан 15.
Отказивање Меморандума

(1) Свака од Страна може да откаже МоР писаним обавештењем другој Страни. МоР ће престати да важи шест месеци након пријема таквог писаног обавештења.

(2) У случају престанка важења МоР, све активности започете у периоду његовог важења биће реализоване под истим условима под којима су и започете.

(3) У случају престанка важења МоР, уговори из члана 4. став (2) МоР, остају и даље на снази, осим ако тим уговорима није другачије предвиђено.

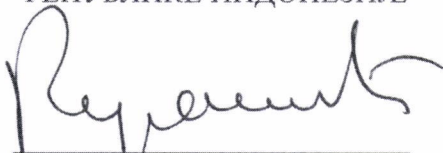
Члан 16.
Ступање на снагу и период важења

(1) Овај МоР ступа на снагу даном пријема последњег обавештења којим се Стране међусобно обавештавају да су, у складу са националним законодавством, спровеле поступак који је неопходан за ступање на снагу МоР.

(2) Овај МоР остаје на снази 5 (пет) година и може бити аутоматски продужен на период од наредних 5 (пет) година, осим ако било која од Страна, писаним путем, не обавести другу Страну о својој намери да откаже МоР.

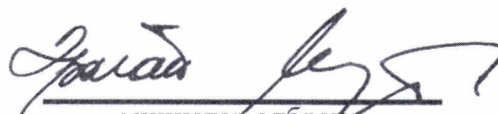
Сачињено у Џакарти, 13 2011. године, у два истоветна примерка на српском, индонежанском и енглеском језику. У случају разлика у тумачењу МоР, меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЈЕ



министар одбране
Пурномо Јусгианторо

ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



министар одбране
Драган Шутановац



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as "Parties"),

Considering the friendly and cooperative relations existing between the two Countries, Governments and People,

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two countries through cooperative activities in the field of defence,

Taking into account the goals and principles of the United Nations Charter to contribute to the peace in the world,

Acting in the spirit of partnership and cooperation with a wish to develop good relations in the field of defence, in order to enhance mutual esteem, confidence and understanding,

Recognizing that the strengthening cooperation in the field of defence will be beneficial to both national defences, particularly Armed Forces,

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries,

Have agreed as follows:

ARTICLE I DEFINITIONS

The terms used in this Memorandum of Understanding (MoU) are defined as follows:

1. "Sending Party" means the country that sends personnel, assets and equipment to the territory of the Receiving Party;
2. "Receiving Party" means the country in the territory of which the personnel, assets and equipment of the Sending Party are located;
3. "Personnel" means military personnel and civilians employed within the institutions and bodies of the Parties.

ARTICLE II OBJECTIVE

1. The objective of this MoU is to establish general principles and procedures for the cooperation between the Parties in the field of defence.
2. The Parties shall cooperate on the basis of the principles of equality, reciprocity and mutual interests, and full respect of the sovereignty and territorial integrity of the respective countries.

ARTICLE III COMPATIBILITY WITH OTHER AGREEMENTS

This MoU shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from international agreements which they have either individually or together concluded with other states or international organizations.

ARTICLE IV COMPETENT AUTHORITIES

1. The Competent Authorities in charge of the implementation of this MoU are the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Republic of Serbia.
2. For the purpose of the implementation of this MoU, the Competent Authorities of the Parties may conclude supplementary arrangements.

**ARTICLE V
AREAS OF COOPERATION**

The Parties may cooperate in the following areas:

1. Defence and Strategic Policy;
2. Logistic Support and Defence Industry Cooperation,
3. Education and Training, and
4. Other areas of mutual interest to be agreed upon by the Parties or their Competent Authorities.

**ARTICLE VI
FORMS OF COOPERATION**

The cooperation between the Parties may be carried out through:

1. Official visits;
2. Defence and Strategic Dialogue,
3. Intelligence Exchange,
4. Exchange of experience and consultations;
5. Training and education programmes;
6. Participation in conferences, symposiums and seminars;
7. Procurement of defence material, transfer of technology, technical assistance of defence industry cooperation, and
8. Other forms of cooperation to be agreed upon by the Parties or their Competent Authorities.

**ARTICLE VII
JOINT COMMITTEE**

1. A joint Committee shall be established to effectively achieve the purposes of this MoU.
2. The Meeting shall be co-chaired by the appropriate senior defence officials from both Parties.
3. The Joint Committee shall:
 - a. Identify the common concern and interest,
 - b. Recommend cooperative activities and programmes within the framework of this MoU,
 - c. Coordinate, monitor and control the implementation of the cooperative activities and programmes,

- d. Review and evaluate the implementation of this MoU,
 - e. Submit report to the respective Defence Ministers of both Parties,
 - f. Settle any difference or divergence of views on the implementation of this MoU.
4. The composition of the members of the Joint Committee shall be mutually agreed by both Parties.
 5. The Joint Committee shall meet once in two years or as and when it deems necessary at a place and date as mutually agreed.
 6. The Joint Committee may establish sub-committees as and when it deems necessary for carrying out cooperation activities, programmes, or other specific tasks. The sub-committees shall report to the Joint Committee.

ARTICLE VIII EXCHANGE OF INFORMATION

1. During the implementation of this MoU the Parties shall exchange solely unclassified information.
2. The exchange and protection of classified information shall be subject to a separate agreement.

ARTICLE IX EXPENSES

1. The Party hosting the Joint Committee meeting in its territory shall bear the costs of meeting and local hospitality, incurred in convening such meeting. Each Delegation of the Parties shall bear its own travel expenses in respect of its attendance at the meetings.
2. Other expenses incurred in the implementation of this MoU are subject to a separate financial arrangement to be concluded between both Parties.

ARTICLE X PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

During the implementation of this MoU, the Parties may conclude a separate agreement on the protection of intellectual property rights.

**ARTICLE XI
GENERAL PROVISIONS**

1. The Personnel of the Sending Party is obliged to comply with the laws, regulations and procedures of the Receiving Party in course of the activities conducted under this MoU in the territory of the Receiving Party.
2. The disciplinary authority for the Personnel of the Sending Party is vested in their Commander, or the senior civil servant or the military representative in the territory of the Receiving Party.
3. For any criminal act committed in the territory of the Receiving Party, the Personnel of the Sending Party shall be under the criminal jurisdiction of the Receiving Party.
4. Each Party waives any claim to compensation in case of death, injury or damage that might occur to the Party's Personnel or property arising from the acts or omissions caused by the Personnel of the other Party during the implementation of this MoU.
5. As an exception to paragraph (4) of this Article, compensations may be claimed in case that this act or omission has occurred due to wilful misconduct or gross negligence. In such a case, the claims shall be settled through direct negotiations between the Parties without being referred to a third party for settlement.
6. In case of death, injury or damage caused to a third party by the Personnel of the Parties while acting under this MoU, the Parties shall agree on the payment of indemnification. If agreement cannot be reached, the case shall be referred to the competent tribunals of the country in which the incident that inflicted the damage took place.

**ARTICLE XII
MEDICAL CARE**

In case of necessity, the Receiving Party shall provide emergency medical and dental care without reimbursement for the Personnel of the Sending Party while on its territory for the purpose of the implementation of this MoU.

**ARTICLE XIII
SETTLEMENT OF DISPUTES**

1. In the event of any dispute concerning the interpretation and implementation of the present MoU, both Parties shall hold talks at the Joint Committee level in order to settle the dispute amicably.
2. In the event of a failure of settlement at this level, both Co-Chairmen of the Joint Committee shall refer the matter to the Parties, if necessary through official channels.

**ARTICLE XIV
AMENDMENTS**

The Parties may make any amendments to this MoU at any time upon mutual written consent. The agreed amendments shall enter into force according to Article 16 of this MoU.

**ARTICLE XV
TERMINATION**

1. Either Party may withdraw from this MoU by sending a written notification to the other Party. The MoU terminates six months upon the receipt of such a written notification.
2. In case this MoU is terminated, all the activities initiated in the period when this MoU was in force shall be carried out under the same conditions that applied when the activities were initiated.
3. In case of termination of this MoU the arrangements from Article 4, paragraph 2, of this MoU shall remain in force, unless otherwise stipulated by those arrangements.

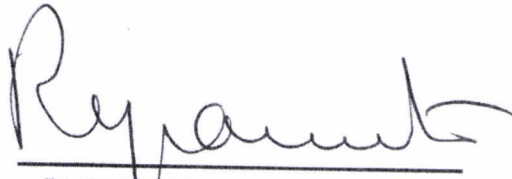
**ARTICLE XVI
ENTRY INTO FORCE AND DURATION**

1. This MoU enters into force on the date of receipt of the second notification by which the Parties inform each other of the fulfilment of their internal procedures necessary for the MoU to enter into force, in accordance with their respective national legislation.

2. This MoU shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be automatically extended for another 5 (five) years unless either party notifies either Party in writing of its intention to terminate this MoU.

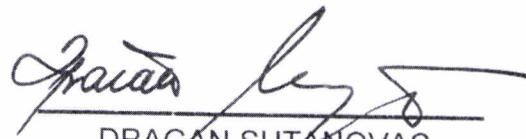
Done in 13rd, on September 20th in two original copies in the Indonesian, the Serbian and the English languages. In case of discrepancies in the interpretation of this MoU the English language version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



PURNOMO YUSGIANTORO
MINISTER OF DEFENCE

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SERBIA



DRAGAN SUTANOVAC
MINISTER OF DEFENCE

Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0348/CTC/12/2018/52
Number



Sulaiman
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 11 Desember 2018
Date